



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWANDI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 509456

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m²/120 m² di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/70 m² di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOBIL, TOYOTA PICKUP Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 27.648.254**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 704.648.254

III. HUTANG Rp. 90.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 614.648.254

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.